

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul: “Purnawirawan TNI Pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Sebagai Kepala Staf Kepresidenan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019”. Penulis menganalisa studi kasus di atas berdasarkan kepada alat analisis teori modalitas untuk menganalisa modalitas yang digunakan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memainkan perannya sebagai aktor di lembaga sipil. Kemudian untuk mengukur apakah modalitas tersebut telah digunakan untuk mendorong sukseksi demokrasi, penulis mengkajinya dengan teori *actor and strategy* yang pada strategi penggunaan modalitas.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menggunakan tiga jenis modalitas yang dimilikinya yaitu (1) modalitas budaya (*cultural capital*) yang meliputi; lingkungan sosial, pendidikan militer, keberanian dalam mengambil risiko, doktrin TNI untuk mematuhi perintah atasan (presiden). Kemudian modalitas selanjutnya adalah (2) modalitas sosial (*social capital*) yang meliputi; luas jaringan (*networks*) yang dimilikinya, pengalaman menarik terkait proses mutasi militer yang pernah dijalani saat Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko masih aktif di dunia kemiliteran. Modalitas selanjutnya adalah (3) modalitas politik yang mencakup; *political wisdom* dan pengalaman di lembaga sipil di HKTI dan partai politik. Modalitas tersebut memberikan Jenderal TNI (Pun.) Moeldoko pengaruh terhadap tindakan, pola pikir, dan keberhasilan peran yang dimainkan oleh beliau saat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Hermans & Cunningham (2018) keberadaan aktor di dalam sebuah sistem atau organisasi memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Aktor memiliki pengaruh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, berhasil mengimplementasikan sebuah program. Keberhasilan sebuah program tidak terlepas dari strategi penggunaan modalitas yang dilakukan oleh aktor. Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko melakukan strategi tersebut dengan: 1).

Membangun komunikasi yang egaliter di KSP, 2). Membangun komunikasi lintas elite dengan tidak terlepas dari *resource dependence*, dan 3) Mengupayakan program yang memperkuat posisi masyarakat sipil.

Eksistensi purnawirawan TNI di dalam pemerintahan sipil, lekat dengan representasi kepentingan militer atau kepentingan politik tertentu. Melalui pendekatan teori modalitas dan *actor and strategy* penjelasan mengenai eksistensi purnawirawan TNI tidak ditemukan adanya kepentingan militer yang dibawa oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko ke dalam lingkup sipil. Strategi penggunaan modalitas yang dilakukannya telah berhasil mendorong tercapainya berbagai program prioritas Presiden Joko Widodo pada tahun 2019.

V.2 Saran

1. Hal yang menurut penulis perlu untuk diperhatikan adalah pentingnya purnawirawan TNI yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan sipil untuk tetap memainkan perannya sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945 dan tidak membawa kepentingan militer dengan membuka ruang remilitarisasi melalui pintu demokrasi.
2. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur jeda waktu purnawirawan TNI boleh berkarir ke dalam jabatan politik, sehingga purnawirawan TNI tidak bisa langsung maju ke dalam jabatan sipil atau kontestasi politik selepas masa jabatannya baru berakhir. Hal ini penting karena untuk memastikan tidak ada lagi konsolidasi militer di dalam tubuh lembaga-lembaga sipil.
3. Saran akademis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan purnawirawan TNI di dalam politik menggunakan analisa teoritis lainnya yang lebih baik menjelaskan kondisi hubungan sipil-militer seperti apa yang idealnya harus terjadi di Indonesia.